



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 14 Agustus 2017

Halaman: 13

Media Massa : **Harjo** Hari : **Senin** Tanggal : **14/08/17** Halaman : **13**

**KINERJA DEWAN KOTA**

## Target 30 Raperda, Selesai Satu

**UMBULHARJO-**  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera mengevaluasi capaian pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang belum maksimal.

Ujang Hasanudin  
hasanudin@harjanjogja.com

Dari 30 raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempera) tahun ini, baru satu raperda yang sudah disahkan, lambatnya kinerja Dewan ini menjadi sorotan masyarakat. "Kami sudah agendakan untuk evaluasi kemungkinan mengurangi target penyelesaian raperda dari 30 raperda menjadi 26 atau 27 raperda," kata Ketua DPRD Kota Jogja, Sujanarko, saat dihubungi Minggu (13/8).

Berdasarkan data dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Jogja, satu raperda yang sudah disahkan, yakni Perda tentang Pertanggungjawaban

► Satu raperda yang sudah disahkan, yakni Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016.

► Lambatnya pembahasan raperda di antaranya ada banyak raperda lunjuran tahun lalu yang belum selesai

Pelaksanaan APBD 2016, Perda tersebut merupakan perda yang rutin yang harus ada setiap tahun. Sujanarko mengungkapkan sejumlah faktor lambatnya pembahasan raperda di antaranya ada banyak raperda lunjuran tahun lalu yang belum selesai dan harus diselesaikan penyelesaian Propempera 2017. Selain itu, juga karena proses fasilitasi di tingkat provinsi yang membutuhkan waktu.

Proses fasilitasi raperda di Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemda DIY yang seharusnya selesai dalam waktu 14 hari kerja, kata Sujanarko, terkadang tidak tepat waktu. "Ada yang sampai dua bulan belum

selesai," kata dia.

Karena itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini meminta Bapemperda memutuskan kembali skala prioritas pembahasan raperda mengingat masa efektif ketugasan anggota Dewan yang terbatas. Sampai akhir tahun ini, masa efektif kinerja Dewan kurang dari 30 hari. Sisanya tugas di luar kantor seperti kunjungan kerja, advokasi dan reses.

Meski anggaran untuk pembahasan 30 raperda sudah tersedia, menurut Sujanarko bisa dialihkan. "Anggarannya bisa dialihkan ke program nonprolegda (propempera) misalnya kalau tiba-tiba ada usulan raperda baru dari eksekutif," ucap Sujanarko.

Anggota Bapemperda DPRD Kota Jogja, Bambang Anjar, belum tentu menambahkan di luar Propempera 2017, pihaknya sudah menyelesaikan tujuh raperda lunjuran 2016 sehingga fokus Dewan masih pada penyelesaian raperda 2016. Namun demikian, Bapemperda tetap akan mengevaluasi masih banyaknya Propempera yang belum dibahas dan kemungkinan mengubah target mengingat waktu yang mepet sehingga tidak memungkinkan untuk dilanjutkan.

Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Lukas Ispandriano mengukuhkan dengan kinerja Dewan kota. "Masyarakat jadi bertanya-tanya apa yang sebenarnya dikerjakan Dewan di tengah pekerjaan rumah yang ada," kata dia.

Lukas tidak yakin Dewan mampu menyelesaikan sisa raperda dalam waktu sebulan. Di luar Propempera 2017, Lukas juga mempertanyakan raperda lunjuran yang tidak pernah selesai padahal sudah mulai dibahas sejak 2014 lalu, yakni Raperda tentang Disabilitas. Baginya raperda itu sangat penting dan kritik warga terhadap raperda tersebut sudah disampaikan ke Dewan berkali-kali.

**KINERJA DEWAN KOTA**

**RAPERDA DISAHKAN**

Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016.

1. **Bag. Hukum**

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

✓ Netral

✓ Biasa

**RAPERDA DISUSUN NASKAH AKADEMIKNYA**

► Raperda Pemakaian Kekayaan Daerah

► Raperda Ketahanan Keluarga

✓ **EVALUASI**

► Target penyelesaian raperda dari 30 raperda menjadi 26 atau 27 raperda

**Tindak Lanjut**

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

.....

Kepala Sekretaris

| Instansi        | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Bagian Hukum | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 02 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005